

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Guna memahami tentang *corporate governance* maka sangat penting memahami hubungan keagenan. Hubungan keagenan itu melibatkan dua pihak yaitu *agent* dan *principal*. *Agent* adalah pihak yang menjalankan perusahaan berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan oleh *principal*. *Principal* itu sendiri adalah pihak pemilik perusahaan. Hubungan antara *principal* dan *agent* itu terjadi pada saat *principal* memperkerjakan individu lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan *principal* juga mendelegasikan kekuasaan kepada *agent* (manajemen) untuk mengambil keputusan atas nama *principal* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hikmah, dkk, 2012).

Hubungan diantara keduanya seringkali menimbulkan masalah yaitu masalah keagenan. Masalah keagenan itu muncul karena *agent* tidak bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Adanya masalah keagenan yang terjadi diantara keduanya maka perusahaan berusaha memahami dan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* ini merupakan penyelesaian

untuk menyelesaikan masalah keagenan yang ada di perusahaan

Adanya masalah keagenan tersebut mendorong perusahaan membuat mekanisme *governance* guna menyelesaikan konflik yang ada.

Teori agensi dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas, dan (3) manusia selalu menghindari risiko (Eisenhardt dalam Darmawati, 2005 dalam Sabrina, 2010). Berdasarkan sifat dasar manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa *agent* lebih banyak bekerja sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Teori keagenan ini menjadi dasar dalam penerapan *corporate governance* (Rini, 2010 dalam Hikmah, dkk, 2012).

## 2. Indikator Masalah Keagenan

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, ada beberapa indikator dari masalah keagenan diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. perusahaan yang besar juga akan memiliki pemegang saham yang banyak juga. Jadi kemungkinan terjadinya masalah keagenan juga sangat besar peluangnya, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang

#### b. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah meningkatnya atau perubahan yang terjadi pada perusahaan secara besar-besaran. Pertumbuhan mencerminkan seberapa besar kesempatan untuk tumbuh yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi cenderung melakukan apapun agar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi maka masalah keagenan yang terjadi di dalam perusahaan kemungkinan juga akan tinggi pula.

#### c. Risiko

Risiko adalah kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi (Soemarmo, 2008 dalam Hardikasari, 2011). Perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi maka ketidakpastian yang ada di perusahaan juga tinggi pula. Perusahaan yang memiliki ketidakpastian yang tinggi maka menunjukkan bahwa masalah keagenan yang ada di dalam perusahaan juga tinggi.

#### d. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme guna mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Ituriaga dan Zans, 1998 dalam Hardikasari, 2011). Perusahaan modern biasanya memiliki struktur kepemilikan menyebar, semakin menyebar struktur

perusahaan dijalankan oleh manajer namun seringkali pemilik tidak suka dengan kegiatan operasi yang dijalankan oleh manajer, sehingga memunculkan konflik keagenan (Widyastuti, 2004 dalam Hardikasari, 2011). Struktur kepemilikan ada dua, yaitu struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer sekaligus pengelola perusahaan. Sedangkan struktur kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh onstitusi.

c. *Leverage*

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan hutang. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi maka masalah keagenan yang terjadi juga tinggi, karena perusahaan harus memberikan laporan kepada kreditur. Kreditur juga tidak akan mudah percaya atau yakin dengan kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh pihak manajer. Hal itu mengakibatkan timbulnya masalah keagenan.

f. *Free Cash Flow*

Menurut Jensen (1986) dalam Suryani (2010) *free cash flow* adalah aliran kas yang merupakan sisa dari pendanaan seluruh proyek yang menghasilkan *net present value* (NPV) positif yang didiskontokan pada tingkat biaya modal yang relevan. Adanya *free cash flow* inilah yang sering menjadi pemicu munculnya masalah antara pemegang saham dengan manajer. Sedangkan menurut (Smith & Kim, 1994 dalam Suryani, 2010)

adanya *free cash flow* akan membuat manajer cenderung untuk menghamburkan *free cash flow* tersebut, sehingga akan terjadi inefisiensi dalam perusahaan atau akan menginvestasikan *free cash flow* dengan *return* yang kecil.

### 3. *Corporate Governance*

#### a. Definisi *Corporate Governance*

Akhmad Syahroza (2002) dalam Prasetyo (2011) menyatakan *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dipakai oleh *Board* untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi secara efektif, efisien, ekonomis dan sesuai dengan prinsip *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (keadilan). Diharapkan semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai tujuan dan nantinya perusahaan bisa mencapai tujuan utamanya. Pandangan *The Business Roundtable* (1997) dalam Wulandari (2006) adalah suatu ukuran yang dapat memenuhi semua proporsi dan dipengaruhi oleh hubungan antara para partisipan dalam sistem *governance*.

*Corporate governance* pada dasarnya adalah kerangka kerja (*framework*) dan merupakan proses bagaimana nantinya perusahaan dikelola. *Corporate governance* adalah cara bagaimana keputusan dibuat dan hasilnya nanti akan

mengenai poin penting dari *corporate governance* diantaranya adalah:

- 1) Sebuah hubungan antara *stakeholder* yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan kebijakan strategis dan kinerja organisasi seperti apa guna mencapai tujuannya.
- 2) Berhubungan dengan identifikasi bagaimana memastikan bahwa keputusan yang strategis dibuat secara efektif.
- 3) Wewenang dalam mengatur dan melaporkan risiko bisnis.

#### b. Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*

Menurut *Organisation of Economic Corporate and Development* (OECD) dalam Prasetyo (2011) menyebutkan bahwa dalam *corporate governance* itu terdapat lima prinsip, diantaranya adalah:

##### 1) *Transparancy* (transparansi)

Perusahaan harus transparan yaitu menyediakan informasi yang relevan dan material dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengungkapkan semua informasi yang ada, tidak hanya informasi yang disyaratkan oleh peraturan saja tetapi semua informasi yang penting untuk pengambilan keputusan.

##### 2) *Accountability* (akuntabilitas)

Perusahaan harus bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilaksanakan secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga nantinya bias meminimalisasi konflik keagenan yang ada di perusahaan.

3) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Perusahaan harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pertanggungjawaban perusahaan merupakan kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan.

4) *Independency* (kemandirian)

Perusahaan yang memiliki kemandirian adalah perusahaan yang dijalankan secara profesional dan independen dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain untuk melancarkan pelaksanaan *corporate governance*.

5) *Fairness* (kesetaraan)

Kesetaraan merupakan tindakan yang adil kepada para *stakeholders*. Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai asas kesetaraan dan kewajaran.

c. Tujuan *Corporate Governance*

*Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG, update: 3) dalam Martiana (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan menerapkan *corporate governance* karena perusahaan memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

- 1) Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional dan internasional.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
- 3) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham serta para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
- 4) Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan risiko yang dihadapi kreditor.
- 5) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 6) Mengangkat citra perusahaan.

d. Manfaat *Corporate Governance*

*Forum Institute of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001, dalam Martiana, 2011) menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* akan mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya adalah:



- keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
  - 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
  - 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholder's Value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari privatisasi.

#### e. Mekanisme *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk meminimalisasi konflik keagenan yang ada di perusahaan. Diharapkan perusahaan bisa dikelola sesuai dengan tujuan yaitu memberikan informasi bagi semua pemangku kepentingan dan bisa memberi kesejahteraan bagi para pemegang saham. Mekanisme yang digunakan meliputi mekanisme internal dan eksternal.

##### 1) Komite Audit

Komite audit adalah orang yang bertugas untuk memberikan pendapat terhadap dewan komisaris berdasarkan laporan kinerja yang

diberikan dewan direksi kepada dewan komisaris (Martiana, 2011). *Stakeholders* lebih percaya terhadap perusahaan yang memiliki komite audit, karena laporan keuangan perusahaan lebih berkualitas sehingga informasi yang diberikan kepada *stakeholders* juga lebih berkualitas.

## 2) Jumlah Komit Audit

Jumlah komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit. Semakin banyak jumlah komite audit diharapkan pengawasan juga semakin baik sehingga laporan keuangan perusahaan bisa lebih berkualitas dan bisa memberikan informasi yang relevan bagi para *stakeholders*.

## 3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mampu mengurangi insentif para manajer dari sifat *opportunity* melalui tingkat pengawasan yang intens (Bushee dalam Gideon, 2005 dalam Martiana, 2011). Adanya kepemilikan institusional bisa mengurangi kegiatan manajemen laba yang ada di dalam perusahaan.

## 4) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab dan bertugas untuk menjamin kualitas informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan (Sukartha, 2007). Adanya dewan komisaris maka akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham untuk tetap menanamkan sahamnya ke

(2006) peranan dewan komisaris diharapkan bisa meningkatkan kualitas laba yaitu dengan membatasi tindakan manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tugas dewan komisaris yang dirumuskan oleh FCGI (Sukartha, 2007), antara lain:

- a) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
- b) Menilai sistem penilaian penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
- c) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
- d) Memonitor pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan jika diperlukan.
- e) Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam

## 5) Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan (Sukartha, 2007). Menurut Sukartha (2007) komisaris independen bertugas untuk mengawasi dan memastikan perusahaan telah menerapkan dan patuh terhadap prinsip-prinsip *corporate governance*. Tugas-tugas komisaris independen diantaranya adalah:

- a) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lainnya.
- c) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d) Kepatuhan perusahaan kepada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

## 6) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah termasuk kegiatan remunerasi untuk

1985), (Jensen dan Murphy, 1080), (Smith and atts, 1992) dalam Sukartha (2007). Adanya kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Pihak manajemen nantinya akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

#### 7) Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi yang ada di dalam perusahaan, semakin banyak dewan direksi maka akan semakin baik dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Jumlah dewan direksi yang ada di dalam perusahaan sangat mempengaruhi efektifitas kegiatan monitoring. Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *governance* yang paling penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan (Bainier S. *et al*, 2003 dalam Purwaningtyas, 2011). Ketentuan jumlah minimal dewan yang disyaratkan dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang harus dilaksanakan yaitu untuk dewan direksi minimal 2 orang (Purwaningtyas, 2011). Dewan direksi bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan (Purwaningtyas, 2011). Dewan direksi akan menentukan strategi seperti

#### 8) Turnover Direksi

Turnover direksi adalah pergantian direksi yang ada di dalam perusahaan. Dewan direksi sangat penting dalam perusahaan, ketika ada dewan direksi yang keluar maka harus diganti dengan dewan direksi yang baru.

#### 9) Kualitas Audit

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain membutuhkan informasi yang berkualitas. Sekarang semua perusahaan yang *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Informasi yang berkualitas dapat dilihat salah satunya dari kualitas audit laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit diukur dengan melihat Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 laporan keuangannya lebih berkualitas karena KAP big 4 memiliki standar internasional dalam melakukan audit sehingga hasilnya lebih terpercaya. KAP Big 4 yang ada di Indonesia antara lain KPMG, Ernst Young, Pricewaterhouse Coopers dan Deloitte (Martiana, 2011).

### 4. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan berdasarkan pada keberhasilan dengan menggunakan berbagai standar (Martiana, 2011).

Penilaian kinerja dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas yang ada di dalam perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja keuangan dan pengukuran kinerja non keuangan (Morse dan davis dalam Sam'ani, 2008). Pengukuran kinerja keuangan membutuhkan informasi berupa informasi keuangan yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan seperti laba sebelum pajak, tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya (Martiana, 2011).

Salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah menggunakan *Cash Flow Return on Assets (CFROA)*. *Cash Flow Return on Assets (CFROA)* mampu menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba bersih (Martiana, 2011). Arus kas (*cash flow*) menunjukkan perputaran dana yang bersifat tunai yang di dalam perusahaan, sehingga dengan arus kas (*cash flow*) akan terlihat keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Klapper dan Love dalam deni dkk (2004) dan Martiana (2011) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Penemuan penting lainnya dari penelitian Klapper dan Love dalam deni dkk (2004) adalah bahwa dalam penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti di Negara berkembang dibanding dengan negara maju. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan

diterapkan di negara-negara seperti di Indonesia.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Masalah Keagenan dan *Corporate Governance***

Penelitian yang dilakukan Aiyesha Dey (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat konflik keagenan yang tinggi akan memiliki *corporate governance* yang semakin baik. Adanya mekanisme *corporate governance* yang semakin baik diharapkan bisa meminimalisasi konflik keagenan yang ada di dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, dkk (2011) membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang merupakan indikator dari konflik keagenan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*. Selain itu penelitian tersebut juga membuktikan bahwa kepemilikan menyebar tidak berpengaruh terhadap *corporate governance* tetapi banyak perusahaan yang struktur kepemilikannya adalah terkonsentrasi, sehingga hal itu menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang merupakan salah satu indikator dari konflik keagenan berpengaruh terhadap *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Lasfer dalam Aiyesha Dey (2008) menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan perusahaan yang juga merupakan indikator dari konflik keagenan rendah maka kecil kemungkinan memiliki dewan independen dan



disimpulkan bahwa konflik keagenan berpengaruh terhadap *corporate governance*.

Penelitian Putra (2011) yang menguji hubungan konflik keagenan terhadap struktur *corporate governance* dan menunjukkan bahwa konflik keagenan berkorelasi terhadap struktur *corporate governance*. Penelitian ini membuktikan bahwa ada beberapa hal yang kemungkinan dapat menyebabkan konflik keagenan berhubungan dengan *corporate governance* adalah manajemen perusahaan akan mendapatkan manfaat jangka panjang dari penerapan *corporate governance*. Keberadaan komite audit dapat memantau perusahaan dalam melaksanakan *corporate governance*. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen dan investor institusi menyebabkan tekanan kepada perusahaan untuk penerapan *corporate governance* juga semakin besar. Penelitian Martiana (2011) juga menemukan bahwa konflik keagenan berpengaruh signifikan terhadap mekanisme *corporate governance*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis yang pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Masalah keagenan berpengaruh positif terhadap *corporate governance*.

## **2. *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan**

Penelitian yang dilakukan Aiysha Dey (2008) menyatakan bahwa

keagenan dan fungsi Dewan Independensi Auditor berkorelasi dengan kinerja

perusahaan. Semakin auditor independen maka menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Penelitian Deni dkk (2004) menunjukkan bahwa *corporate governance* akan mempengaruhi kinerja operasi perusahaan. Klapper dan Love dalam Deni dkk (2005) juga menunjukkan ada hubungan positif antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Xu dan Wang (1997), Pizzaro *et al.* (2006), dan Bjuggren *et al.* (2007) dalam Ni wayan (2010) serta hasil penelitian Nugraha (2011) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional dengan jumlah yang besar akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan apabila lembaga institusi bisa menjadi alat pemantauan yang efektif bagi perusahaan.

Menurut Jensen dalam Martiana (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat jumlah saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Semakin besar jumlah saham manajerial dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Penelitian Basley dalam Martiana (2011) membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen dapat mengurangi kecurangan pada laporan keuangan. Adanya komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan

saham minoritas dan pihak – pihak lain yang terkait. Semakin meningkat proporsi dewan komisaris maka kinerja perusahaan juga semakin baik.

Klein dalam Siallagan dan Machfoeds (2006) membuktikan bahwa perusahaan yang membentuk komite audit, akrual diskresioner perusahaan menunjukkan hasil yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Penelitian Martiana (2011) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain itu penelitian Putra (2011) juga menunjukkan bahwa *corporate governance* berhubungan dengan kinerja perusahaan.

FCGI (2001) dalam Martiana (2011) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang kuat akan meningkatkan kinerja perusahaan. Karena adanya kepercayaan dari investor akan membuat kinerja perusahaan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis yang kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Corporate governanace* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

### 3. Masalah Keagenan dan *Corporate Governance*

Penelitian pada perusahaan-perusahaan AS yang dilakukan oleh Gillan, Hartzell, dan Starks (2003) dalam Aiysha Dey (2008), yang menguji sejauhmana karakteristik industri berhubungan dengan struktur *corporate*

dan pendirian perusahaan. Mereka membuktikan bahwa faktor industri berkontribusi sebagai variasi penjelas paling besar dalam indikasi *governance*, dan mendominasi faktor perusahaan. Hermalin dan Weisbach (1988, 2003) dalam Aiyesha Dey (2008) menyatakan bahwa dewan direksi merupakan respon endogen masalah keagenan. (Bushman et al., 2004, dalam Putra, 2011) mendokumentasikan bahwa struktur dewan, insentif ekuitas direktur, kompensasi eksekutif, dan konsentrasi kepemilikan bervariasi sesuai sistem akuntansi perusahaan dan kompleksitas organisasi. Klein (2002) dalam Aiyesha Dey (2008) menguji determinan ekonomi atas independen komite audit, dan mencatat bahwa independen komite audit meningkat bersama ukuran dewan dan persentase eksternal dewan.

Penelitian yang dilakukan Aiyesha Dey (2008) membuktikan bahwa konflik keagenan yang ada di perusahaan bervariasi sehingga *corporate governance* yang digunakan untuk menyelesaikannya juga berbeda – beda antar perusahaan. Penelitian Larcker, Richardson, dan Tuna, 2007 (LRT) juga menunjukkan bahwa *corporate governance* setiap perusahaan tidak mungkin sama untuk menyelesaikan konflik keagenan yang ada.

Klein juga membuktikan bahwa komite audit independensi menurun bersamaan dengan kesempatan tumbuh perusahaan, ketika perusahaan berturut-turut mengalami dua kali atau lebih kerugian dan hadirnya mekanisme pemantauan alternatif. Menurut konteks komite audit, temuannya

menyarankan hal yang diperlukan bagi perusahaan adanya fleksibilitas dalam menentukan komposisi komite audit. Studi tersebut menyediakan motivasi untuk keberlanjutan penelitian mengenai bagaimana mekanisme *governance* bervariasi antar perusahaan, dan bagaimana ini mempengaruhi peran *governance* pada kinerja perusahaan dan keputusan perusahaan lain. Studi ini berkontribusi terhadap bukti pada literatur sebelumnya dengan mencatat bahwa perusahaan dengan konflik keagenan yang semakin tinggi memiliki mekanisme *governance* yang semakin baik, dan hubungan antara mekanisme *governance* dan kinerja perusahaan secara keseluruhan juga bervariasi pada tingkat konflik keagenan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pengaruh masalah keagenan terhadap *corporate governance* bervariasi antar perusahaan.

### C. Model Penelitian

Model penelitian ini menggambarkan yaitu pengaruh masalah keagenan terhadap

..... dan hubungannya dengan kinerja perusahaan

**Gambar 1.1**

Model hubungan masalah keagenan, *corporate governance* dan kinerja perusahaan

